

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipahami sebagai suatu bentuk upaya pengkaji untuk dapat dicarinya bentuk perbandingan dan juga dimanfaatkan untuk ditemukannya suatu bentuk hal yang baru atau suatu inspirasi untuk melaksanakan upaya pengkajian selanjutnya, di samping itu fungsi dari kajian terdahulu diketahui dapat memberikan bantuan dalam upaya penelitian yang dapat diposisikan sebagai bentuk perbandingan untuk menunjukkan keaslian dari hasil kajian. Pada bagian ini dilakukan upaya pemaparan mengenai penelitian terdahulu oleh pengkaji dengan di dalamnya mencakup hasil penelitian terdahulu yang berkaitan pada penelitian yang akan dilaksanakan, lalu dilakukannya upaya pembuatan ringkasan, baik pada kajian yang telah diunggah atau terpublikasi atau kajian yang belum terkomplikasi. Berikut disajikan mengenai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan pada kajian yang akan dilakukan.

Pada upaya dilaksanakannya kajian dibutuhkan suatu bentuk informasi-informasi yang sifatnya sesuai atau relevan mengenai pada permasalahan yang tengah dikaji. Oleh karena itu, hadirnya kajian terdahulu dapat berperan sebagai suatu bentuk acuan oleh pengraji untuk didapatkannya suatu informasi terkait. Berikut disajikan beberapa bentuk rangkuman jurnal dari kajian-kajian terdahulu, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung)”* yang ditulis oleh (Priambodo, Widyaningrum, & Rahmat, 2020) pada kajian ini disajikan bahwa terkait Indonesia sendiri diketahui memiliki beragam bencana atau menjadi negara yang memiliki bencana terlengkap di dunia seperti fenomena-fenomena yang telah ditemui mengenai bencana banjir, gelombang pasang, dan bencana lain yang berkaitan yang disajikan pada penelitian ini. Diketahui pula pada

kajian ini dipaparkan bahwa terkait bencana alam yang hadir di Indonesia kerap kali hadir secara begitu saja dan diketahui tidak dapat dilakukan upaya prediksi kapan akan hadir atau terjadi. Hal ini diketahui menghadirkan suatu sebab atau menghadirkan Suatu bentuk persoalan dalam upaya melakukan penanganan terhadap bencana. Metode kajian yang diaplikasikan pada kajian ini yakni berupa desain kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan secara studi literatur. Diketahui terkait peran TNI dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap bencana di wilayah provinsi Lampung tidak dapat terlepas dari fungsi yang dimiliki oleh TNI itu sendiri yang Wah tercantum pada amanat undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Korem 043/Gatam diketahui telah melaksanakan terkait langkah-langkah yang sifatnya strategis baik pada proses sebelum bencana, tanggap terhadap bencana dan juga fase setelah bencana atau pasca bencana. Keterlibatan para TNI pada proses melakukan penanggulangan bencana diketahui tidak berdiri secara mandiri, tetapi juga melakukan kerjasama dan juga melakukan Sinergi dengan dan melakukan komunikasi pada pihak-pihak instansi di wilayah pemerintahan dan juga para stakeholder lain serta melakukan upaya pemaksimalan terkait aktivitas pembinaan tutorial atau Binter yang diketahui menjadi satu dari beberapa tugas yang dimiliki oleh komando hitam 043/Garuda Hitam di Propinsi Lampung.

2. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul "*Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang*" yang ditulis oleh (Findayani, 2015) diketahui pada kajian ini menyajikan bahwa terkait bencana seperti banjir, berada pada peringkat ketiga atau urutan ketiga sebagai penyebab hadirnya kerugian pada bidang ekonomi dari keseluruhan bencana yang hadir di dunia. Di wilayah kota Semarang sendiri, yang diketahui merupakan kota Waterfront yang telah menerima dampak banjir atau menderita banjir Pada kurun waktu yang lama. Kajian ini berupaya memfokuskan pada usaha melakukan identifikasi dan juga penganalisis dan terkait Respon yang

dihasilkan masyarakat dan juga keterkaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki, kesiapan dalam menghadapi bencana dan juga tingkat tindakan yang dilakukan. Hal ini merupakan bentuk studi kasus dari upaya eksplorasi berdasarkan pada data primer dan juga data yang bersifat sekunder. Data primer dilakukan pengumpulan melalui upaya observasi, terkait kuesioner, upaya wawancara yang sifatnya semi terstruktur dan juga FGD. Diketahui terkait suatu ukuran dari sampel sendiri dipilih sejumlah 128 sampel dengan berdasar pada pengaplikasian metode purposive sampling. Temuan yang dihasilkan pada kajian ini menyajikan bahwa individu yang beres di tempat tinggal di wilayah pesisir diketahui memiliki pengetahuan dalam tingkat tinggi mengenai banjir yakni pada persentase 64%. Sedangkan terkait pengetahuan tersebut diketahui sifatnya relatif tinggi pada jumlah dari pengalaman di masa lampau mereka, tetapi diketahui mereka memiliki kekurangan dalam melakukan kesiapan yakni disajikan pada presentase 43% sebab bagian warga berprofesi sebagai nelayan yang diketahui memiliki penghasilan rendah sehingga warga bisa tidak harus banyak usaha untuk melakukan upaya adaptasi ketika rumah mereka berdampak banjir. Pada sisi lain, individu-individu yang bertempat tinggal di pedalaman, diketahui mereka memiliki kurang pengetahuan mengenai bencana tersebut yakni disajikan pada persentase 18% sebab banjir diketahui relatif baru atau bencana baru yang menyerang mereka, tetapi diketahui terkait tingkat yang baik yang mereka miliki yakni terkait kesiapan hal ini disajikan pada presentase 24% sebab mereka memiliki tingkat pendapatan yang bernilai tinggi atau relatif tinggi. Selanjutnya, kedua komunitas yang berada di wilayah pesisir dan juga pedalaman diketahui memiliki tingkat tinggi terkait pemberian tindakan sebab pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki juga bernilai tinggi bagi pihak-pihak atau warga yang berada di wilayah pesisir dan juga terkait kesiapan yang baik bagi warga yang berada di wilayah pedalaman. Kajian ini berupaya mengarah pada suatu bentuk rekomendasi untuk

melakukan peningkatan terkait kapasitas mengenai adaptasi masyarakat untuk dapat diatasinya banjir. Rekomendasi ini berupa untuk melakukan pengembangan terkait ketahanan yang dimiliki masyarakat terhadap hadirnya bencana dalam basis pendidikan. Kerangka utama yang disajikan pada kajian ini yakni untuk ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai suatu bencana dan juga terkait ketahanan yang dimiliki masyarakat terhadap bencana banjir.

3. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul “*Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Aceh Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan)*” yang ditulis oleh (Muttaqin, 2015) dengan diketahui kajian ini berupaya menyajikan bahwa terkait kawasan Taman hutan raya Pocut merah Intan, dengan diketahui memiliki luas kurang lebih 6.220 hektar yang tepatnya berada di wilayah sekolah mengalami kebakaran yang hadir sebab atau fenomena tersebut terjadi sebab adanya pembakaran terhadap lahan. Kajian ini berupaya untuk melakukan pembahasan mengenai peran yang dimiliki masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan juga menanggulangi terkait kebakaran yang terjadi di hutan dan juga dibahas mengenai penguatan yang dimiliki masyarakat dalam melakukan penanggulangan terkait kebakaran di hutan yang berada atau yang terjadi di kawasan Taman hutan raya tersebut. Kajian ini mengaplikasikan desain penelitian berupa kualitatif dengan upaya analisis secara deskriptif. Hasil yang disajikan pada kajian ini yakni bahwa terkait upaya yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pencegahan dan upaya melakukan penanggulangan terkait kebakaran yang terjadi di hutan dan juga pada lahan tersebut diketahui telah dilaksanakan oleh pihak-pihak masyarakat dengan mengaplikasikan suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan dan juga terkait kearifan lokal. Diketahui terkait keterlibatan masyarakat dalam upaya melakukan pengamanan hutan

menjadi satu dari beberapa bagian dari usaha mitigasi bencana mengenai kebakaran hutan pada kawasan tersebut. Terkait penguatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut pada bencana kebakaran hutan dilaksanakan dengan upaya sosialisasi terkait penyadartahuan mengenai suatu bencana kebakaran yang terjadi di hutan dan juga melakukan pelibatan masyarakat dalam upaya melakukan pemanfaatan terkait hasil dari hutan yang sifatnya non kayu yang berada di kawasan tersebut sebagai upaya untuk ditingkatkannya ekonomi masyarakat dengan harapan dapat diubahnya kebiasaan yang dimiliki masyarakat pada wilayah sekitar atau pada wilayah tersebut yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

4. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat*" yang ditulis oleh (Sawerah, Muljono, & Tjitropranoto, 2016) dengan diketahui kajian ini menyajikan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan gambut di wilayah Kalimantan Barat secara khususnya di kabupaten Mempawah kerap hadir atau terjadi pada tiap-tiap musim kemarau. Diketahui pula terkait Berbagai usaha untuk melakukan pencegahan telah dilaksanakan atau diupayakan oleh pemerintah. Mengenai dicapainya suatu upaya pencegahan terkait tidak dapat dilepaskan dari partisipasi pihak-pihak masyarakat di sekitar. Terkait pentingnya memberikan partisipasi atau partisipasi dari masyarakat bersifat penting sebab sebagai pihak pelaksana berbagai aktivitas yang telah diupayakan oleh pihak-pihak pemerintah. Kajian ini berupaya menganalisis terkait tingkat partisipasi yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran di lahan gambut, terkait hubungan faktor di wilayah dalam atau internal terhadap pihak-pihak partisipan atau terkait partisipasi, dan untuk diketahuinya mengenai hubungan faktor luar atau eksternal terhadap partisipan atau partisipasi. Kajian lapangan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh data yakni tepatnya pada bulan Maret hingga Mei 2015 di

wilayah kabupaten tersebut. Populasi yang dimanfaatkan pada kajian ini berjumlah 95 anggota dari pihak-pihak masyarakat yang diketahui lahannya pernah terbakar dan diketahui dimilikinya lahan yang berada di sekitar lahan yang terbakar. Upaya pengumpulan data yakni dengan cara sensus pada populasi tersebut. Metode yang digunakan untuk melakukan penganalisan yakni berupa statistik deskriptif dan juga statistik yang bersifat inferensial. Hasil kajian menyajikan bahwa terkait tingkat partisipasi yang dihadirkan masyarakat dalam melakukan pencegahan terkait kebakaran lain diketahui sangat rendah. Terkait hasil upaya analisis statistik inferensial menyajikan bahwa faktor yang berkaitan pada partisipasi yakni faktor dari wilayah luar atau eksternal, di dalamnya terjangkau peran upaya pihak-pihak penyuluh dan juga terkait hubungan yang dihadirkan dari lingkungan sosial. Faktor di wilayah dalam atau internal yang memiliki keterkaitan yakni mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki dan juga pendapatan yang didapat. Partisipasi yang dihadirkan masyarakat agar dapat ditingkatkan dibutuhkan peran dari pihak-pihak penyuluh yang secara merata dan juga pemerintah yang dapat memberikan peran secara aktif untuk dapat memberikan pembinaan dan juga melakukan pelatihan mengenai sasaran secara tepat atau sasaran yang tepat.

5. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor*" yang ditulis oleh (Putra & Podo, 2017) dengan diketahui pada kajian ini menyajikan bahwa terkait faktor-faktor yang berperan sebagai pengaruh mengenai tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai mitigasi bencana alam seperti longsor di wilayah desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen diperoleh pemahaman bahwa umur dari pihak-pihak responden sebagian besar sendiri berada pada 26 hingga 35 tahun, terkait jenis kelamin sendiri lebih banyak perempuan, pendidikan sebagian besar lulusan SMP, terkait profesi sebagian besar warga tersebut yakni petani, terkait tingkat

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai mitigasi bencana alam yakni tanah longsor pada wilayah tersebut berada pada kategori baik dan umur menjadi faktor yang sifatnya paling dominan yang diketahui memiliki bentuk pengaruh pada tingkat pengetahuan yang dimiliki warga masyarakat mengenai mitigasi bencana alam yakni berupa tanah longsor di wilayah tersebut.

6. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor”* yang ditulis oleh (Umeidini, Nuriah, & Fedryansyah, 2019) diketahui mengenai kajian ini berupaya menyajikan bahwa bencana alam dipahami sebagai suatu bentuk peristiwa atau suatu serangkaian kejadian yang memberikan dampak yakni hadirnya korban penderitaan terhadap individu atau manusia, kerugian, kerusakan, serta diketahui dapat menghadirkan suatu bentuk gangguan pada tatanan kehidupan dan juga penghidupan dari individu. Khususnya pada wilayah pulau Jawa diketahui semakin hari semakin tampak dampak dari bencana yang hadir yakni terhadap gangguan-gangguan yang sifatnya dalam proses alami, misalnya terjadinya curah hujan yang tinggi yang disertai angin kencang atau badai yang kerap muncul. Pada wilayah Desa Mekar Galih Kecamatan Jatinangor menjadi satu dari beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Sumedang yang rentan terhadap bank banjir dan juga bencana longsor. Kajian ini memiliki tujuan untuk melakukan peninjauan atau melihat terkait wujud partisipasi yang dihadirkan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana takdinal, terkait sejauh mana masyarakat memiliki pedulian terhadap hadirnya bencana yang menimpa pada tiap musim penghujan. Metode yang diaplikasikan yakni desain kualitatif dengan dimanfaatkannya upaya analisis dengan berdasar pada interpretasi melalui Data primer maupun data yang bersifat sekunder. Hasil kajian ini menyajikan bahwa hadirnya bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap

bencana di wilayah desa tersebut wujud partisipasi yang dihadirkan yakni dalam wujud pemikiran, terkait tenaga, dan juga keterampilan, dalam wujud barang dan juga uang. Kelima dari bentuk partisipasi yang telah dipaparkan diketahui telah diaplikasikan dan telah terlaksana secara baik di wilayah masyarakat tersebut ketika terjadinya bencana banjir.

7. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”* yang ditulis oleh (Wahidah et al., 2020) dimana dalam kajian ini menyajikan bahwa terkait Sinar kita yang dimiliki pemerintah dan juga masyarakat menjadi hal utama untuk melakukan penanggulangan terhadap penyebaran wabah covid 19, dengan diketahui bahwa terkait pemerintah melakukan relaksasi psbb dan juga diketahui berupaya mengeluarkan dua opsi yakni terkait pembatasan sosial dengan skala lokal yakni berada pada tingkatan RT atau RW dan juga new normal Life sebagai bentuk tatanan kehidupan yang normal dengan bersifat baru dengan diketahui kedua kebijakan tersebut sangat bergantung pada peran yang dimiliki masyarakat untuk secara taat mematuhi. Maka dari itu pihak-pihak pemerintah diketahui tak henti-hentinya untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat mengenai bahaya dari wabah tersebut dan meminta masyarakat agar dapat beraktivitas di rumah saja kecuali terdapat aktivitas yang merusak, sekarang tinggal bagaimana suatu masyarakat dapat secara logis berpikir dan juga secara rasional dalam menghadirkan sikapnya mengenai permasalahan tersebut. Masyarakat secara harus menghindari terkait pemikiran mengenai bias yang buruk yang telah dipaparkan, diketahui cepat atau lambat terkait pandemi covid 19 juga selain mendapatkan pengaruh dari pengaturan terkait kebijakan dari pihak-pihak pemerintah juga diketahui mendapatkan pengaruh oleh disiplin yang dimiliki masyarakat untuk dapat dipatuhi atau kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi terkait kebijakan-kebijakan yang

dihadirkan.

8. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara”* yang ditulis oleh (Awalia, Mappamiring, & Aksa, 2015) pada kajian ini menyajikan bahwa terkait peran yang dimiliki pemerintah dalam upaya melakukan penanggulangan terkait risiko bencana banjir di wilayah Desa tahibua Kecamatan tiwu Kabupaten Kolaka Utara telah membaik, hal ini tampak pada peranan yang dimiliki oleh ketua BPBD dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip terkait manajemen bencana secara baik dan agama yakni dengan cara yang cepat dan juga tepat.
9. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda”* yang ditulis oleh (Suryadi, 2020) pada kajian ini berupaya disajikan bahwa peran dari BPBD dalam melakukan penanggulangan terkait risiko bencana banjir di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan telah membaik, hal ini tampak dalam peranan yang dihadirkan dari kepala BPBD dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip mengenai manajemen bencana secara baik dan, Yakni dengan cara tepat bahwa terkait penanggulangan terhadap bencana dilaksanakan dengan secara cepat dan juga tepat menyesuaikan pada tuntutan dari kondisi atau keadaan. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya melakukan penanggulangan terkait risiko bencana banjir telah baik atau sudah baik, sebagaimana diketahui bahwa terkait masyarakat turut serta dalam memberikan partisipasinya yakni dalam mengikuti penyuluhan atau upaya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak BPBD ataupun dari instansi atau dinas yang berkaitan lain, masyarakat juga diketahui turut serta dalam melakukan penjagaan atau menjaga lingkungan di sekitarnya agar dapat dicegahnya bencana banjir apabila hujan secara terus menerus.
10. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Analisis Manajemen Mitigasi Badan*

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat” yang ditulis oleh (Fitriani, Zulkarnaen dan Bagianto, 2021) pada bagian ini disajikan bahwa upaya pencegahan dan juga upaya pemulihan bencana di wilayah Indonesia menjadi satu dari beberapa sektor yang sifatnya terpenting. Indonesia diketahui sebagai negara yang rawan menghadirkan bencana atau rawan terjadi bencana secara tentunya harus memiliki kemampuan dalam melakukan pelaksanaan terkait penanggulangan terhadap bencana secara baik dan titik Hal ini sifatnya penting agar terkait bencana ketika hadir kerugian yang dialami tidak menjadi hambatan dalam melakukan pembangunan dan juga kemajuan secara sosial. Kajian ini memiliki tujuan untuk dilakukannya kajian terhadap penanganan. Letusan mitigasi bencana alam di gunung Tangkuban Parahu diketahui agar dapat secara mampu melakukan persiapan diri dalam menghadapinya bencana tersebut atau ancaman bencana, sejarah intinya penelitian ini memanfaatkan kualitatif yang diketahui dapat menghadirkan suatu sajian gambaran secara lebih efektif dan juga secara efisien. Teknik yang diaplikasikan untuk melakukan pengumpulan data Yakni dengan melakukan observasi ke BPBD wilayah tersebut dan juga pada lokasi yang diketahui menjadi kemungkinan terdampak erupsi dari gunung tersebut yang merupakan objek dalam kajian ini peneliti dibantu oleh anggota pengkaji ataupun yang lain, serta upaya data yang memiliki keterkaitan pada bahan kajian. Selain itu upaya pengumpulan data juga dilaksanakan dengan upaya wawancara secara struktural untuk dijangingnya informasi yang tidak didapatkan melalui upaya observasi. Satu dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah di wilayah daerah pada bidang pencegahan dan juga siap siaga BPBD di wilayah provinsi Jawa Barat adalah dengan dipersiapkannya diri dalam dihadapinya ancaman mengenai bencana yang hadir. Terkait manajemen mitigasi sendiri adalah suatu bentuk analisis kehidupan yang secara harus dilakukan peninjauan dengan cara berkala oleh pihak-pihak pembuat kebijakan. Pada

prinsipnya sendiri terkait komitmen atau terkait bentuk kesepakatan dengan pihak-pihak stek holders dalam melakukan perencanaan terkait penanggulangan terhadap bencana dibedakan dengan cara yang detail dan rumah secara terstruktur dan juga bersifat komprehensif.

11. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Analisis dan Perancangan Sistem Pengumpulan Data Bencana Alam”* yang ditulis oleh (Indriasari, Anindito, & Julianto, 2014) pada kajian ini berupaya disajikan bahwa terkait tindak penanganan terhadap bencana menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak pemerintah di wilayah pusat dan juga di wilayah daerah. Data yang sifatnya akurat dan juga cepat pada saat hatinya bencana menjadi kebutuhan atau dibutuhkan agar upaya penanggulangan terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, secara tepat, dan juga dapat terkoordinasi secara baik dan juga secara menyeluruh terhadap instansi-instansi pemerintah yang berkaitan. Pada kajian ini diketahui hanya disajikan pemaparan mengenai bagian tahap pertama pengkajian atau penelitian. Diketahui penelitian ini akan melakukan pengembangan terkait sistem dalam dua platform, yakni platform pertama mobile yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak petugas atau relawan untuk melakukan pencatatan terkait data yang menjadi kebutuhan di wilayah lokasi bencana. Kedua, platformwap dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan data atau data yang dikumpulkan oleh pihak-pihak relawan atau petugas lapangan akan dilakukan penyimpanan di server dan juga disajikan atau ditampilkan pada peta untuk menghadirkan kemudahan bagi petugas dalam dilakukannya upaya koordinasi terkait penanganan terhadap bencana.

12. Penelitian terdahulu berikutnya berjudul *“Analisis Reliabilitas Dan Responsivitas Dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil”* yang ditulis oleh (Manik, 2019) diketahui terkait kajian ini berupaya menyajikan bahwa kendala secara umum yang kerap dialami

oleh pihak-pihak BPBD di wilayah kabupaten Aceh Singkil pada saat terjadinya bencana kebakaran yakni kesulitan dalam usaha melakukan penanganan di wilayah lapangan diantaranya diketahui air yang berada pada jumlah terbatas dan juga terkait sumber air sendiri pada wilayah lokasi kebakaran, diketahui tidak Tersedianya fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran di wilayah lingkungan dan juga pada bangunan, terkait juga pada respon dari unit pihak-pihak pemadam kebakaran yang kadang mengalami keterlambatan tiba pada lokasi sebab jauhnya jarak yang ditempuh untuk menuju tempat tersebut dan juga terkait keadaan lalu lintas. Berdasar pada hasil kajian dan juga upaya pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terkait realibilitas bareponsivitas BPBD di wilayah kabupaten Aceh Singkil dalam melakukan penanggulangan terhadap kebakaran diketahui belum dianggap baik atau belum baik. Berapa hal yang menjadi saran antara lain dapat dilakukannya upaya pelatihan bagi pegawai-pegawai honor, melakukan penambahan terkait jumlah posko pemadam kebakaran dan, dijalinnya kerjasama dengan pihak instansi lain mengenai ketersediaan air serta dapat diperhatikannya dan juga ditanggapinya keluhan yang hadir dari masyarakat.

Persamaan dengan kajian-kajian sebelumnya dengan kajian saat ini disajikan sebagai berikut:

1. Yang dikaji diketahui sama-sama membahas terkait penanggulangan terhadap bencana yang dihadirkan alam
2. Jenis dan juga metode yang diaplikasikan dalam kajian diketahui sama-sama memanfaatkan desain deskriptif kualitatif.

Cadangan terkait hal yang menjadi pembeda dengan kajian terdahulu pada kajian ini disajikan sebagai berikut:

Objek pada kajian sebelumnya diketahui bukan dari pemerintah daerah kota Tual

Sedang pada kajian yang saat ini dilaksanakan yakni secara khusus meneliti atau menjadikan kota Tual sebagai objek kajian atau pemerintah kota Tual sebagai objek kajian.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Peran

Menurut Solway (2004), tujuan yang dimiliki pemerintah di wilayah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana melalui dibentuknya BPBD mencakup hal-hal yang disajikan sebagai berikut:

1. Bukan upaya identifikasi individu dan juga pada wilayah yang diketahui rentan terhadap bencana pada cakupan Kabupaten.
2. Dilakukan upaya pemastian bahwa keseluruhan anggota masyarakat telah memahami atau menyadari terkait potensi mengenai dampak bencana yang dihadirkan alam.
3. Melakukan upaya pembagian saran dan juga panduan mengenai praktik secara baik kepada pihak-pihak masyarakat untuk dilakukannya Upaya mitigasi bencana.
4. Berupaya menjaga hubungan dengan pihak-pihak pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan, terkait kesehatan, dan juga berkaitan pada kesejahteraan dengan dikeluarkannya bentuk peringatan atau suatu sistem upaya pengendalian masa atau publik dan juga kebakaran.
5. Upaya memastikan bahwa keseluruhan anggota masyarakat telah menerima untuk pelatihan pertama aid atau terkait pertolongan pertama yang sifatnya sesuai.
6. Melakukan atau menjalankan program terkait pendidikan dan juga penyadaran kepada pihak-pihak masyarakat Melalui aktivitas yang dihadirkan yang diketahui bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah di sekitar.
7. Lakukan upaya identifikasi terkait rute yang digunakan untuk evakuasi dan juga terkait lokasi tempat yang aman serta lokasi yang digunakan untuk para pengungsi.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa terkait pemerintah di wilayah

daerah memiliki tanggung jawab sekaligus diketahui memiliki wewenang dalam melakukan penyelenggaraan terkait upaya penanggulangan terhadap bencana di wilayahnya. Bupati atau pihak Walikota diketahui berperan sebagai pihak penanggung jawab utama dan juga terkait Gubernur sendiri memiliki fungsi untuk memberikan dukungan berupa perkuatan. Beberapa terkait tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana yakni mencakup upaya pengalokasian dana penanggulangan terhadap bencana, melakukan pemaduan penanggulangan bencana dalam upaya Pembangunan Daerah, yang perlindungan kepada masyarakat melalui ancaman yang hadir sebuah bencana, dilaksanakan suatu upaya bentuk tanggap darurat dan agama serta dilaksanakannya upaya pemulihan setelah terjadinya bencana. Sejalan pada tanggung jawab yang telah dipaparkan, pihak-pihak pemerintah daerah diketahui memiliki wewenang dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana yang disajikan sebagai berikut:

1. Lakukan perumusan terkait kebijakan dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana di wilayah terkait.
2. Bukan upaya penentuan terkait status dan juga terkait tingkat dari kondisi atau keadaan secara darurat.
3. Melakukan pengerahan terkait potensi sumber daya yang dimiliki di wilayah terkait.
4. Jalannya upaya kerjasama dengan pihak-pihak dari daerah lain.

2.2.2 Bencana Alam

Undang-undang yang tercakup pada nomor 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa terkait yang dimaksud dari bencana dipahami sebagai suatu bentuk peristiwa atau serangkaian peristiwa yang memberikan ancaman dan juga memberikan gangguan pada kehidupan dan juga penghidupan dari masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor yang berada dari alam atau faktor yang sifatnya non alam maupun faktor yang dihadirkan manusia sehingga memberikan dampak atau akibat hadirnya korban jiwa, kerusakan pada lingkungan, kerugian, dan juga

berdampak pada psikologis manusia. Diketahui Terdapat tiga jenis bencana atau kategori yang disajikan sebagai berikut:

1. Bencana alam diketahui sebagai suatu bencana yang hadir dari alam atau dari peristiwa atau dari suatu rangkaian peristiwa dengan faktor utama dari alam antara lain dapat berwujud gempa bumi dan lain sebagainya.
2. Bencana non-alam kami sebagai suatu bencana yang hadir atau sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang hadir atau tidak dilatarbelakangi dari alam yakni wujud gagal dalam teknologi atau kegagalan teknologi, gagalnya modernisasi, dan hadirnya wabah di masyarakat.

Bencana sosial dipahami sebagai suatu bencana yang hadir sebab dari manusia dan berdampak juga untuk manusia yakni seperti konflik secara sosial atau secara kelompok atau yang dilakukan oleh komunitas di wilayah masyarakat.

2.2.3 BPBD

Pada pandangan secara historis, terkait Badan Penanggulangan terhadap bencana diketahui berdiri dengan berdasar pada kebutuhan mengenai keselamatan hidup masyarakat terhadap hadirnya ancaman dari bencana yang diketahui dilatarbelakangi dari keadaan Secara geografis, geologi, secara hidrologis, dan juga secara demografis. Hal tersebut yang memberikan dorongan Indonesia untuk dibangunnya visi dalam melakukan pembangunan terkait ketangguhan bangsa dalam dihadapinya bencana. Fakta yang diketahui bahwa wilayah Indonesia sendiri menjadi gugusan kepulauan yang terbesar yang berada di dunia dengan diketahui berada diantara benua Asia dan juga australis dan juga berada pada wilayah lautan Hindia dan juga Pasifik dengan dimiliki total keseluruhan 17,58 pulau dengan 129 gunung api yang diketahui masih berstatus aktif, serta diketahui terletak pada pertemuan Divergen lempeng tektonik yang diketahui aktif di dunia yakni lempeng indo-australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Mengingat terkait kekayaan Secara geografis, secara geologis dan lemah secara hidrologi dan

koma dan juga secara demografis yang dimiliki Indonesia diketahui tidak selalu menghadirkan dampak yang baik, Selain itu hadirnya suatu potensi memberikan dampak yang bersifat buruk. Hal ini selanjutnya menjadi suatu bentuk tantangan, sehingga terkait atas dasar yang telah dipaparkan, upaya pembentukan lembaga yang diketahui berupa fokus pada kebencanaan menjadi satu dari beberapa bagian dari hal yang menjadi kebutuhan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, diketahui kehadiran lembaga yang dimaksud dan juga yang telah dikenal hari ini sebagai dan penanggulangan terhadap bencana tentunya diketahui memiliki sejarah yang sifatnya panjang.

Pada 1945 misalnya, pemerintah Indonesia diketahui tepatnya di masa kemerdekaan melakukan inisiasi yakni pembentukan badan penolongan keluarga korban perang (BPKKP) yang dimilikinya tugas yakni dilaksanakannya pemberian pertolongan pada korban perang dan juga keluarga yang menjadi korban perang semasa dilakukannya perang untuk kemerdekaan. Akan tetapi, badan tersebut hanya bertahan hingga 1996, selanjutnya terkait lembaga tersebut mempunyai suatu macam atau berbagai bentuk perubahan secara baik melalui segi nama maupun pada segi tugas dan juga fungsi yang dimiliki dengan dikenal sebagai Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP). Badan terkait diketahui hadir atau dihadirkan menyesuaikan Keputusan Presiden No. 256 Tahun 1966.